

**TRADISI NIKAH NAIK ANTARA LAKI-LAKI
YANG SUDAH BERKELUARGA DENGAN SEORANG GADIS
DAN DAMPAKNYA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko
Kabupaten Rokan Hilir)**

S K R I P S I

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)
Di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH :

I S W A N D I
NIM. 10621003695

**JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan taufik dan hidayah-Nya serta nikmat yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad saw, yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa ummatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu penngetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang.

Dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **TRADISI NIKAH NAIK ANTARA LAKI-LAKI YANG SUDAH BERKELUARGA DENGAN SEORANG GADIS DAN DAMPAKNYA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM'** (Studi Kasus Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir''. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap strata satu (S1) pada Jurusan Akhwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Pekanbaru.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu secara moril maupun materil. Karena itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Teristimewa buat kedua orang tua tersayang yang telah memberikan semangat, dorongan serta do'a untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim selaku Rektor UIN Suska Riau beserta staf-stafnya.
3. Yang terhormat Bapak DR. H. Akbarizan, MA. M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta Pembantu Dekan I, II, III dan staf atau karyawan Fakultas Syari'ah.

4. Yang terhormat Ketua Jurusan Bapak Drs. Yusran Sabili, M. Ag dan Sekretaris Jurusan Bapak Drs. Zainal Arifin, MA yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Ibu Dra. Yusliati, MA selaku pembimbing skripsi, yang telah membimbing dan mengarahkan skripsi penulis.
6. Khusus buat yang tercinta Ayahanda KH. Salim dan Ibunda Musni.
7. Keluarga besar penulis; Bang Amrizal dan Bang Briptu Suhaimi Hamid, Kak Dewiyanti, Adek-adek penulis; Saini, Am. Keb, Sawirman, Muhammad Hazali, Paman-paman penulis; Jasman dan Abdul Karim
8. Tidak lupa kepada teman-teman seperjuangan; Ali Raja, M. Syukur, Sunardi, Awis Qornaen, Ahmad Kurniawan, Supriadi, Sigit Widodo, Syawal, Khairi, M. Robi Rahman, Khairul Anwar, Deni, Lukman Hakim, Syamsul Anwar, Abdurrahman, Helmi, dan teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat buat kita semua. *Amin ya Robbal 'alamin.*

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, April 2012

Penulis

ISWANDI
NIM. 10621003695

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
ABSTRAK	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	11
 BAB II KEPENGHULUAN BAGAN PUNAK PESISIR	
KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR	
A. Kondisi Geografis.....	13
B. Penduduk.....	15
C. Agama	17
D. Pendidikan.....	20
E. Ekonomi Masyarakat	21
F. Sosial dan Budaya	22
 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	
A. Pengertian Pernikahan.....	25
B. Dasar Hukum Pernikahan	26
C. Rukun dan Syarat Menikah.....	31
D. Tujuan Pernikahan	32
E. Hikmah Disyari'atkan Menikah.....	34
 BAB IV TRADISI NIKAH NAIK ANTARA LAKI-LAKI YANG	
SUDAH BERKELUARGA DENGAN SEORANG GADIS DAN	
DAMPAKNYA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi	
Kasus Di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan	
Bangko Kabupaten Rokan Hilir)	
A. Bentuk Pelaksanaan Nikah Naik Di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.....	37

B. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Nikah Naik Di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir	46
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Nikah Naik Dan Dampaknya Di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir	51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	58
B. Saran-Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	: Jumlah Penduduk	16
Tabel II.2	: Keadaan Penduduk Menurut Umur.....	16
Tabel II.3	: Keadaan Penduduk Berdasarkan Suku.....	17
Tabel II.4	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	18
Tabel II.5	: Jumlah Sarana Ibadah	19
Tabel II.6	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	21
Tabel II.7	: Sarana Prasarana Pendidikan	22
Tabel II.8	: Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	22
Tabel IV.1	: Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I Mengetahui Tentang Adanya Tradisi Nikah Naik Di Tengah Masyarakat	37
Tabel IV.2	: Apakah Nikah Naik Hanya Terjadi Antara Laki-Laki Dan Perempuan Yang Belum Menikah Saja	38
Tabel IV.3	: Apakah Faktor Penyebab Laki-Laki yang Sudah Menikah Melakukan Nikah Naik	38
Tabel IV.4	: Apakah Faktor Ekonomi Juga Menjadi Penyebab Terjadinya Nikah Naik	41
Tabel IV.5	: Respon Masyarakat terhadap Nikah Naik.....	43
Tabel IV.6	: Respon Para Istri Ketika Suaminya Melakukan Nikah Naik	44
Tabel IV.7	: Dampak Tradisi Nikah Naik Terhadap Kedua Belah Pihak dan Keluarga.....	46
Tabel IV.8	: Dampak yang Ditimbulkan Dari Nikah Naik.....	47
Tabel IV.9	: Apakah Nikah Naik Merupakan Aib di Masyarakat	48
Tabel IV.10	: Nikah Naik Yang Terjadi Antara Laki-Laki Dengan Seorang Gadis Mengakibatkan Terjadinya	49

ABSTRAK

Penelitian berjudul **“TRADISI NIKAH NAIK ANTARA LAKI-LAKI YANG SUDAH BERKELUARGA DENGAN SEORANG GADIS DAN DAMPAKNYA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM” (Studi Kasus Di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)**. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang dilaksanakan di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Dari hasil observasi yang telah dilakukan di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, ditemukan beberapa permasalahan, yaitu ditemukan adanya tradisi nikah naik yang terjadi antara seorang gadis dengan laki-laki yang berstatus sudah menikah di tengah masyarakat, dimana yang akhirnya menjadikan penyesalan di kemudian hari bagi pihak perempuan terkait status yang disandang oleh seorang laki-laki yang menjadi suaminya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk pelaksanaan nikah naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir; Apa saja dampak yang ditimbulkan dari nikah naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir; dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi nikah naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Dengan demikian, kegunaan penelitian ini dilaksanakan adalah diharapkan penelitian ini berguna sebagai kontribusi pemikiran dalam dunia pendidikan khusus tentang tradisi nikah naik yang terjadi antara gadis dan laki-laki yang berstatus sudah beristeri; Diharapkan penelitian ini berguna sebagai referensi bagi peneliti berikutnya; dan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.

Subjek dalam penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan yang melakukan nikah naik, dan tokoh masyarakat. Sementara objek penelitiannya adalah tradisi nikah naik antara laki-laki yang sudah beristeri dengan perempuan yang masih gadis di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Populasi dalam penelitian ini pihak yang terkait langsung dalam tradisi tradisi nikah naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yaitu laki-laki dan perempuan yang melakukan nikah naik, tokoh masyarakat. Dalam menetapkan jumlah sampel penelitian, penulis menggunakan *teknik purposive sampling*, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 22 orang, terdiri dari 20 orang laki-laki dan perempuan nikah naik, dan 2 orang tokoh masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, angket, dan wawancara. Sementara teknik analisa data adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan jalan mengklasifikasikan data-data yang akan dikumpulkan di lapangan berdasarkan persamaan jenis. Kemudian data tersebut dianalisis dan diuraikan secara gamblang sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya diperoleh hasil penelitian, yaitu Pelaksanaan tradisi nikah naik yang terjadi antara seorang gadis dengan laki-laki yang sudah menikah di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, merupakan suatu aib di masyarakat. Pernikahan tersebut dilatarbelakangi oleh faktor perzinahan, faktor ekonomi. Hanya saja, khusus faktor ekonomi, bisanya faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah naik antara bujang dan gadis, bukan antara gadis dan laki-laki yang sudah menikah. Sebagian besar masyarakat di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir mengetahui adanya tradisi nikah naik. Namun, ada yang mendukung, menolak dan bersifat netral. Akan tetapi, bagi para isteri sangat menolak dengan adanya nikah naik yang dilakukan orang suaminya.

Ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari tradisi nikah naik yang terjadi antara seorang gadis dengan laki-laki yang sudah menikah di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Dari dampak yang ditimbulkan, hampir tidak ditemukan dampak positif dari pelaksanaan tradisi ini. Melainkan, yang ditemukan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, seperti terjadinya kenakalan remaja, terjadinya pergaulan bebas, adanya anak yang lahir di luar nikah, konflik antarkeluarga, dikucilkan dari keluarga.

Setelah menganalisis dari pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkan dari tradisi nikah naik yang terjadi antara seorang gadis dengan laki-laki yang sudah menikah di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi nikah naik bertentangan dengan hukum Islam. Karena bertentangan dengan prinsip dan tujuan dari perkawinan yang dilakukan, yaitu pernikahan merupakan sunah Rasulullah SAW, dan pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilakukan, bukan mendatangkan konflik, lahirnya anak di luar nikah, dan lain sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagan Punak Pesisir merupakan salah satu daerah kepenghuluan yang terletak di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir memiliki luas wilayah $\pm 80 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari 2 Dusun, 7 RW (Rukun Warga) terdiri atas 21 RT (Rukun Tetangga). Daerah ini terdapat heterogen suku, terdiri dari suku Melayu, Jawa, Batak¹. Akan tetapi, mayoritas penduduknya bersuku bangsa Melayu, sehingga bahasa yang dominan digunakan masyarakat dalam berkomunikasi adalah bahasa Melayu. Begitu juga dalam hal dengan tradisi dan kebudayaan lebih didominasi oleh tradisi dan kebudayaan Melayu, seperti mempercayai seorang dukun, mempercayai benda-benda keramat, dan lainnya².

Di tengah masyarakat Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, ditemukan berbagai kebiasaan yang berifat turun temurun dan berkembang di antaranya tradisi nikah naik. Menurut Muhammad Abed al-Jabiri tradisi adalah masalah yang absah dan bisa dibenarkan. Sebab, tradisi merupakan bagian esesial dari kebutuhan manusia itu sendiri untuk mengkaji dirinya dan mengembangkannya³.

¹ Syarifuddin (Tokoh Masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir), *wawancara*, 12 Maret 2011.

² Syarifuddin (Tokoh Masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir), *wawancara*, 12 Maret 2011.

³ *Ibid.*

Nikah naik adalah suatu cara yang dilakukan agar dipermudah untuk melangsungkan perkawinan.⁴ Dengan demikian tradisi nikah naik adalah suatu kebiasaan yang dilakukan agar dipermudah melangsungkan perkawinan, dengan cara seorang perempuan mendatangi rumah laki-laki untuk dimintai pertanggung jawaban⁵.

Dari pengertian di atas, dipahami bahwa seorang wanita mendatangi rumah laki-laki, dan meminta laki-laki yang didatangi untuk menikahnya. Dengan konsekuensi pihak perempuan tidak kembali ke rumahnya sebelum ia dinikahkan dengan laki-laki tersebut.

Menurut Muhammad Qohar, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tradisi nikah naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, yaitu:

1. Faktor perzinahan yang dilakukan oleh pasangan tersebut.
2. Faktor ketidakpastian, dimana antara laki-laki dan perempuan menjalin hubungan percintaan dalam rentang waktu yang lama dan tidak ada target dan perencanaan untuk melangsungkan pernikahan.
3. Faktor ekonomi. Dalam hal ini pihak laki-laki tidak memiliki kemampuan untuk meminang dengan hantaran yang ditentukan pihak perempuan, karena pihak laki-laki tidak memiliki kemampuan bidang ekonomi⁶.

⁴ Baharuddin. Z, (Tokoh Masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir), *wawancara*, 11 Maret 2011.

⁵ Baharuddin. Z, (Tokoh Masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir), *wawancara*, 11 Maret 2011.

⁶ M. Qohar, (Masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir), *wawancara*, 12 Maret 2011.

Secara bahasa, nikah berasal dari kata “*nahaka-yankihu-nikaahan-nakhan*” mengandung makna nikah atau kawin⁷. Sementara menurut istilah nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan⁸. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dituliskan bahwa pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi⁹.

Sementara dalam Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diterangkan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁰. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga ditemukan pengertian perkawinan adalah aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan idadah¹¹.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sehingga dengan pernikahan tersebut berpeluang mendapatkan pahala dan keridhaan Allah SWT.

⁷ Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus: Indonesia – Arab; Arab-Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1971), h. 255.

⁸ Syawaqi, dkk, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Surabaya: Indah, 1996), h. 340.

⁹ Depdikbud, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 689.

¹⁰ Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1990), h. 7.

¹¹ Abdurahman, *Kompilasi Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo. 1992), h. 114.

Di dalam al-Qur'an maupun hadits, akan banyak ditemukan pembahasan tentang pernikahan atau perkawinan, diantara terdapat di dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (TQS. Ar-Ruum [30] : 21)¹².

Dari dalil di atas, terdapat pemahaman bahwa Allah SWT telah menciptakan pasangan dari jenisnya masing-masing, hal ini dilakukan agar lahirnya sikap mengasihi dan mencitai antara pasangan tersebut. Kemudian, penciptaan pasangan tersebut merupakan suatu bentuk atau tanda dari kekuasaan Allah SWT.

Hasil wawancara dengan Rina, disimpulkan bahwa tradisi nikah naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, akan tetapi dewasa ini tradisi nikah naik juga terjadi antara pasangan lak-laki yang sudah menikah dengan seorang perempuan berstatus gadis atau janda. Kondisi demikian terjadi karena kedua

¹² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), h. 406.

belah pihak saling percaya satu sama lain, sehingga pihak perempuan tidak menelusuri atau mengetahui bahwa laki-laki yang dimintai pertanggung jawabannya berstatus berkeluarga¹³.

Menurut Ria Mahmud, kebenarannya baru diketahui ketika perempuan tersebut meminta pertanggung jawaban dari pihak laki-laki dengan cara mendatangi rumahnya supaya dinikahkan¹⁴.

Keterangan dari Ketua RT 13 RW 4 Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, selama tahun 2010 ditemukan 9 kasus pasangan laki-laki dan perempuan yang melakukan tradisi nikah naik. Keadaan demikian mengakibatkan pihak keluarga terutama isteri dan anak-anaknya mendapatkan celaan dari tindakan dari masyarakat setempat¹⁵.

Menurut Sabaruddin, tradisi nikah naik antara perempuan dengan laki-laki yang sudah beristeri terjadi karena keinginan untuk berpoligami, tetapi laki-laki tersebut tidak mendapatkan izin dari isterinya untuk berpoligami tersebut, sehingga tradisi ini merupakan salah satu solusi yang dilakukan dalam mewujudkan keinginan tersebut. Maka, dengan tindakan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan mendatangi rumah laki-laki dengan tujuan agar mereka dinikahkan, maka pihak keluarga terutama isteri dengan kondisi terpaksa menyetujui suaminya untuk berpoligami.¹⁶

¹³ Rina (Masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir), *wawancara*, 12 Maret 2011.

¹⁴ Ria Mahmud (Masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir), *wawancara*, 10 Maret 2011.

¹⁵ Serigani (Ketua RT 13 RW 4 Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir), *wawancara*, 10 Maret 2011.

¹⁶ Sabaruddin, (Masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir), *wawancara*, 12 Maret 2011.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“TRADISI NIKAH NAIK ANTARA LELAKI YANG SUDAH BERKELUARGA DENGAN SEORANG GADIS DAN DAMPAKNYA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM” (Studi Kasus Di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir).**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan sampai kepada maksud yang diinginkan, penulis membatasi penelitian ini tentang tradisi nikah naik yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang berstatus sudah beristeri dengan seorang gadis dan dampaknya menurut hukum Islam (Studi Kasus di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir).

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan nikah naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir?
2. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari nikah naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang tradisi nikah naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan nikah naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari nikah naik yang terjadi antara laki-laki yang berstatus sudah beristeri dengan seorang gadis di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi nikah naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini berguna sebagai kontribusi pemikiran dalam dunia pendidikan khususnya tentang tradisi nikah naik yang terjadi antara gadis dan laki-laki yang berstatus sudah beristeri.
- b. Diharapkan penelitian ini berguna sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang dilaksanakan di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Alasan penulis memilih lokasi ini, agar penulis mudah mendapatkan data-data yang dibutuhkan tentang permasalahan yang diteliti. Kemudian, menurut penulis permasalahan tentang tradisi nikah naik hanya ditemukan dan terjadi di masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir dan tidak ditemukan di daerah-daerah lain, meskipun memiliki kesamaan dari segi geografis, yaitu daerah pesisir pantai lainnya di Propinsi Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah laki-laki yang sudah beristeri dan perempuan yang melakukan tradisi nikah naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir. Adapun objek penelitiannya adalah tradisi nikah naik antara laki-laki yang sudah beristeri dengan perempuan yang masih gadis di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir.

3. Populasi dan Sampel

Berdasarkan subjek penelitian, maka populasi dalam penelitian ini adalah laki-laki yang sudah beristeri dengan seorang gadis yang melakukan tradisi nikah naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir dan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan dengan subjek penelitian. Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 orang.

Dalam menetapkan jumlah sampel penelitian, penulis menggunakan Teknik *Total Sampling*, yaitu dengan menetapkan keseluruhan dari populasi sebagai sampel dalam penelitian. Alasan penulis menggunakan Teknik *Total Sampling*, karena jumlah populasi yang ada memungkinkan bagi penulis untuk memintai informasi langsung tentang tradisi nikah naik.

4. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden, yaitu data yang diperoleh dari laki-laki dan perempuan yang melakukan nikah naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir.
- b. Data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian yang diperoleh dari Ketua RT, tokoh masyarakat, dan berbagai informasi yang sudah dipublikasikan seperti buku-buku dan literatur-literatur yang membahas tentang permasalahan dalam penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik observasi, adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian tentang tradisi nikah naik yang terjadi antara laki-laki yang sudah beristeri dengan seorang gadis.
- b. Teknik angket, adalah teknik yang digunakan dengan cara membuat daftar pertanyaan dan disertai pilihan jawaban, kemudian daftar pertanyaan tersebut diajukan kepada responden yang melakukan tradisi nikah naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir.

- c. Teknik wawancara, adalah teknik yang digunakan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan seputar permasalahan tradisi nikah naik yang terjadi antara laki-laki yang sudah beristeri dengan seorang perempuan berstatus belum bersuami.

6. Metode Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan tentang tradisi nikah naik, dianalisis dengan menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengklasifikasikan data-data tersebut berdasarkan persamaan jenis. Selanjutnya dianalisis dan diuraikan secara jelas, sehingga penulis memperoleh gambaran yang jelas dan utuh tentang tradisi nikah naik yang terjadi antara laki-laki sudah beristeri dengan perempuan berstatus gadis di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir.

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini menggunakan tiga metode penulisan:

- a. Metode Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan kaedah-kaedah yang bersifat umum untuk diuraikan dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu dengan mengumpulkan berbagai jawaban yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deskriptif, yang menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian terdiri dari lima bab pembahasan, sebagai berikut;

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir; dalam bab ini membahas tentang Letak Geografis, Penduduk, Agama, Pendidikan, Ekonomi, Sosial dan Budaya

Bab III : Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dalam Islam. Bab ini membahas tentang Pengertian dan Dasar Hukum, Syarat dan Rukun Pernikahan, Tujuan Pernikahan, dan Hikmah Pernikahan.

Bab IV : Tradisi Nikah Naik Antara Bagi Lelaki Yang Sudah Berkeluarga Dengan Seorang Gadis Dan Dampaknya Ditinjau Menurut Hukum Islam. (Studi Kasus Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir). Dalam bab ini membahas tentang Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Tradisi Nikah Naik Di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir; Apa Saja Dampak Yang Ditimbulkan Dari Nikah Naik Di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir; dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Nikah Naik Dan Dampaknya Di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir.

Bab V : Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini akan disimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, selanjutnya penulis merekomendasikan saran-saran yang dibutuhkan demi perbaikan perubahan yang akan diharapkan di masa mendatang.

BAB II

KEPENGHULUAN BAGAN PUNAK PESISIR

KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR

A. Kondisi Geografis

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah telah memberikan wewenang kepada setiap daerah bebas dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Relevan dengan hal itu desa-desa yang ada di Kabupaten Rokan Hilir menggunakan istilah yang sendiri atau berbeda dengan desa-desa yang ada di kabupaten lain khususnya di provinsi Riau. Perubahan tersebut adalah mengganti penggunaan istilah desa menjadi *kepenghuluan* dengan Kepala Desa menjadi Penghulu¹.

Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir merupakan salah satu daerah integral yang terletak di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang berdataran rendah, bertanah liat dan keras dengan curah hujan yang tinggi per tahun rata-rata adalah 2.593 mm².

Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir mempunyai luas wilayah ± 80 Km² yang terdiri dari 2 (dua) dusun, 7 (tujuh) RW (Rukun Warga) terdiri atas 21 RT (Rukun Tetangga). Sebagian wilayahnya digunakan untuk perumahan rakyat dan hutan bakau (hutan *mangrove*). Ketinggian tanah dari permukaan

¹ Kepenghuluan adalah sebutan lain yang sama dengan desa. Kepenghuluan sebutan desa khas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Lihat Peraruran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda Rohil.

² Demografis dan Monografis Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Tahun 2010.

laut diperkirakan ± 2 m, suhu rata-rata adalah 21°C - 33°C bahkan pada hari-hari tertentu dapat mencapai 35°C , sebagaimana daerah-daerah beriklim tropis lainnya. Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir terdapat dua musim dalam sepanjang tahunnya yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Jarak Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir dengan pusat Kantor Kecamatan $\pm 1,5$ Km, dan ± 1 Km jarak antara lokasi Kepenghuluan dengan pusat Kabupaten Rokan Hilir.

Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir adalah wilayah yang dikelilingi lautan dan sungai, sehingga mempengaruhi kondisi tanah. Sebagian besar tanahnya ialah rawa-rawa. Transportasi yang digunakan adalah transportasi darat dan laut. Untuk transportasi dalam kota menggunakan transportasi darat, seperti mobil, sepeda motor, becak, sepeda. Sedangkan transportasi antar daerah di wilayah Kabupaten Rokan Hilir menggunakan transportasi laut, seperti perry, pompong, dan sampan³.

Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir mempunyai batas-batas wilayah, sebagai berikut:

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Rokan;
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bagan Hulu;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Madya Dumai Barat⁴.

³ Demografis dan Monografis Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Tahun 2010.

⁴ Demografis dan Monografis Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Tahun 2010.

B. Penduduk

Pendudukan merupakan salah satu modal dasar pembangunan suatu bangsa, sehingga pengetahuan tentang masalah kependudukan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, prioritas pembangunan harus diletakan pada pembinaan kualitas dan kepribadian Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan peningkatan kecerdasan, keterampilan serta kesehatan fisik dan mental anak-anak yang menjadi generasi penerus agama dan bangsa, tanpa penduduk yang berkualitas, maka bangsa yang mempunyai modal yang kuat tidak akan dapat menyongsong pembangunan gemilang, namun sebaliknya.

Data statistik Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir tahun 2010, penduduk Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir terdiri dari 713 KK dengan jumlah penduduk 9.248 jiwa, dengan perincian 4.816 orang laki-laki dan 4.432 orang perempuan.

Tabel II.1
Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah/Orang	Persentase
1.	Laki-laki	4.816	52,08 %
2.	Perempuan	4.432	47,92 %
Jumlah		9.248	100,00%

Sumber: Data Penduduk Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Tahun 2010.

Dari tabel di atas diketahui komposisi penduduk Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir berimbang antara laki-laki (4.816 jiwa) dengan persentase (52,08 %) dan perempuan (4.432 jiwa) dengan persentase (47,92 %). Dari sini jelas bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak begitu besar.

Tabel II.2
Keadaan Penduduk Menurut Umur

No	Umur	Jumlah/Jiwa	Persentase
1	0-04 Tahun	705	7,62%
2	05-09 Tahun	512	5,54%
3	10-14 Tahun	811	8,77%
4	15-19 Tahun	1.007	10,89%
5	20-24 Tahun	1.306	14,12%
6	25-29 Tahun	1.222	13,21%
7	30-34 Tahun	1.074	11,61%
8	35-39 Tahun	970	10,49%
9	40-44 Tahun	600	6,49%
10	45-49 Tahun	202	2,18%
11	50-54 Tahun	402	4,35%
12	54-59 Tahun	272	2,94%
13	60 Ke atas	165	1,78%
	Total	9.248	100.,00%

Sumber: Data Penduduk Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Tahun 2010.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir adalah penduduk yang berusia antara 20-24 berjumlah 1.306 orang dengan persentase 14,12%. Sementara jumlah penduduk yang terkecil adalah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas berjumlah 165 orang dengan persentase 1,78%.

Selanjutnya Penduduk Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir merupakan masyarakat yang multi etnis, dan pada umumnya mereka dapat bekerja sama dengan baik, terutama dalam urusan kemasyarakatan. Dan melihat jumlah penduduk berdasarkan suku dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku

No	Suku	Jumlah/Orang	Persentase
1.	Melayu	8.040	86,94%
2.	Jawa	970	10,49%
3.	Batak	238	2,57%
Jumlah		9.248	100,00%

Sumber: Data Penduduk di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Tahun 2010.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi penduduk berdasarkan etnis di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir terdiri atas suku Melayu 8.040 orang dengan persentase 86,93%, suku Jawa 970 jiwa dengan persentase 10,49%, dan suku Batak 238 jiwa dengan persentase 2,58%. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa suku melayu merupakan suku yang mayoritas dan suku jawa menempati urutan kedua dan urutan ketiga ialah suku batak.

C. Agama

Dalam membangun masyarakat, aspek agama merupakan salah satu unsur terpenting dari institusi sosial. Tanpa agama sulit untuk menciptakan keharmonisan ditengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, secara fitrah, manusia adalah makhluk yang memiliki naluri beragama.(*gharizatul tadayyun*)⁵. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa ketika agama tidak diharapkan, hal ini merupakan pengaruh dari pemahaman sekulerisme⁶.

⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *Syakhisiyah Islamiyyah* (terj), Zakia, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), h. 14.

⁶ Taqiyuddin An Nabhani, *Nizham al-Islam*, Ahli Bahasa Abu Amin,dkk, *Peraturan Hidup Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), h. 39.

Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir mayoritas penduduknya menganut agama Islam, hanya sebagian kecil saja yang memeluk agama Kristen. Meskipun terdapat heterogen keyakinan, kerukunan antar umat beragama tetap terbina. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel II.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Keyakinan	Jumlah/Org	Persentase
1.	Islam	9.239	99,99%
2.	Kristen	9	0,01%
Jumlah		9.248	100%

Sumber: Data Penduduk Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Tahun 2010.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi penduduk berdasarkan agama atau keyakinan di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, terdiri atas Islam 9.239 jiwa dengan persentase (99,99%), dan kristen 9 jiwa dengan persentase (0,01%). Dari persentase di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir adalah beragama Islam.

Dalam beragama sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung sehingga terlihatnya suasana beragama di tengah-tengah masyarakat. Islam adalah agama mayoritas di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, akan tetapi dalam kehidupan beragama masyarakat Islam di daerah tersebut sangat mengedepankan sikap toleran beragama, dimana adanya saling menghargai antar pemeluk agama. Sehingga agama diluar Islam tidak pernah mengalami hambatan dalam beribadah. Untuk lebih jelas tentang jumlah rumah ibadah di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.5
Jumlah Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah/Unit	Keterangan
1.	Masjid	3	Permanen
2.	Musholla / Surau (Rumah Suluk)	7	Permanen
Jumlah		10	Permanen

Sumber Data Sarana Ibadah Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Tahun 2010.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir terdapat 3 (tiga) unit masjid yang permanen, 7 unit musholla/surau (Rumah Suluk) yang permanen. Dan tidak ditemui rumah ibadah untuk yang non muslim. Bagi masyarakat yang berkeyakinan selain Islam seperti Kristen, dalam menjalankan aktifitas ibadah mereka mendatangi pusat Kota Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana dijelaskan sebelumnya ± 1 Km dari letak geografis Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir. Karena, di kepenghuluan ini tidak terdapat bangunan sarana ibadah selain sarana ibadah untuk umat Islam.

Di samping itu, dalam masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir berkembang sebuah pemahaman thareqat. Dewasa ini, masyarakat beranggapan bahwa paham thareqat ini merupakan satu-satunya pemahaman yang dapat mengantarkan seseorang kepada keridhaan Allah SWT dengan selamat hidup di dunia dan akhir. Dengan demikian, masyarakat beranggapan bahwa pemahaman tersebut merupakan pemahaman satu-satunya yang dianggap benar. Hal ini terlihat dari sikap masyarakat yang menerima secara keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh guru-guru (Khalifah). Sehingga, berkembanglah sikap taqlid di tengah masyarakat.

D. Pendidikan

Dalam pada itu komposisi penduduk Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir dilihat dari aspek pendidikan, dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel II.6
Jumlah Penduduk
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Sekolah Dasar	2.858	30,90%
2.	SLTP	1.702	18,40%
3.	SLTA	1.483	16,04%
4.	Diploma / Perguruan tinggi	167	1,80%
5.	Tidak / belum sekolah	3.038	32,85%
Jumlah		9.248	100%

Sumber Data Demografis Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Tahun 2010.

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa pendidikan masyarakat belum memadai dimana sebagian penduduk di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir masih berpendidikan tingkat sekolah dasar 2.858 jiwa dengan persentase (30,90%), SLTP 1.702 jiwa dengan persentase (18,40%), SLTA 1.483 jiwa dengan persentase(16,04%), sedangkan yang berpendidikan Perguruan Tinggi baik tingkat Diploma maupun Strata Satu (S1) hanya 167 jiwa dengan persentase (1,80%), dan yang tidak atau belum bersekolah sebanyak 3.038 jiwa dengan persentase (32,85%). Dari sini jelas banyak ditemukan yang tidak sekolah atau yang di bawah umur. Disini dapat kita lihat bahwa masih rendah tingkat pendidikan yang ada.

Kemudian, tinggi rendahnya tingkat pendidikan sangat dipengaruhi oleh adanya sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Untuk mengetahui keadaan sarana prasarana pendidikan di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel II.7
Sarana Prasarana Pendidikan

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah/Unit	Persentase
1	SD/ Sederajat	12	80,00%
2	SLTP/ Sederajat	1	6,67%
3	SLTA/ Sederajat	2	13,33%
Jumlah		15	100,00%

Sumber Data Monografis Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, 2010.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang terbanyak di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir adalah Sekolah Dasar (SD) yaitu 80,00%.

E. Ekonomi

Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir masyarakatnya memiliki sumber pendapatan yang beraneka ragam, ada yang berprofesi sebagai nelayan, petani, buruh, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pekerjaan-pekerjaan lain. Untuk jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.8
Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

No	Mata Pencapaian	Jumlah	Perentase
1.	Nelayan	1.982	31,72%
2.	Buruh	1.652	26,44%
3.	Petani	1.508	24,13%
4.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	860	13,76%
5.	Pekerjaan lain	246	3,94%
Jumlah		6.248	100%

Sumber Data Demografis Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Tahun 2010.

Dari tabel di atas jelas bahwa masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian besar adalah sebagai nelayan berjumlah 1.982 jiwa dengan persentase (31,72%), sementara buruh berjumlah 1.652 jiwa dengan persentase (26,44%), dan petani berjumlah 1.508 jiwa dengan persentase (24,13%), Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 860 jiwa dengan persentase (13,76%) dan pekerjaan lain berjumlah 246 jiwa dengan persentase (3,94%), seperti makelar, biro jasa, dan lain-lain.

Urutan komposisi penduduk berdasarkan mata pencapaian pada tabel di atas mencitrakan dominasi dari mayoritas penduduk Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sebagai nelayan.

F. Sosial dan Budaya

Bila dilihat dari segi sosial dan budaya, masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, adalah masyarakat yang mengadopsi garis keturunan dari pihak bapak, dan dikenal dengan istilah *patrilineall*. Karena, sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa dari aspek demografis mayoritas penduduk di daerah

ini bersuku melayu dan beragama Islam. Oleh karena itu, secara otomatis sebagian besar adat dan tradisi yang berkembang sangat dipengaruhi oleh Islam. Hal ini dapat dilihat pada acara penyambutan kelahiran, pernikahan dan kematian.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan waktu, serta didukung dengan kemajuan dalam bidang *sains teknologi*, sehingga di tengah masyarakat, terjadi pergeseran nilai-nilai adat dan budaya yang ada dan atau telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Hal ini terlihat jelas dari sikap dan perilaku masyarakat yang lebih mengutamakan rasionalitas dari pada adat yang lebih menuntut kepada keyakinan semata. Sikap dan perilaku demikian, sebagian besar ditemukan pada remaja atau generasi mudanya.

Kondisi demikian merupakan kontradiktif terhadap sikap dan perilaku dari generasi muda atau remajanya pada dua dasawarsa yang lalu, dimana dalam berinteraksi atau bergaul dengan lawan jenis merupakan suatu hal yang tabu atau sulit ditemukan, karena generasi muda atau remajanya masih dan sangat menghargai nilai-nilai adat dan agama yang ada. Akan tetapi, perilaku dan sikap tersebut sangat sukar ditemukan pada kondisi sekarang ini, seperti interaksi antar lawan jenis yang sampai kepada melanggar nilai-nilai dan norma agama dan adat istiadat yang ada di masyarakat. Karena, menurut sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa agama dan tradisi yang ada dan merupakan warisan dari generasi sebelumnya tidak sesuai (relevan) dengan perkembangan situasi, waktu dan zaman. Oleh karena itu, bila diperhatikan dari sikap masyarakat terhadap adat, maka dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Kelompok yang masih mendukung dan mengharapkan serta berusaha menjaga kelestarian adat istiadat yang telah diwariskan;
2. Kelompok yang beranggapan bahwa adat tidak perlu dipertahankan. Karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang serba canggih sekarang.

BAB III

TINJAUAN UMUM

TENTANG PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa, kata nikah berasal dari kata “ - ينكح - ” mengandung makna nikah atau kawin¹. Menurut Abdul Rahman Al-jazairi; nikah adalah “senggema dan berkumpul”². Dalam Kamus Bahasa Indonesia ditemukan bahwa kata nikah dengan kawin merupakan dua istilah yang berbeda, tetapi mengandung makna yang sama.

Secara istilah nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan³. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi⁴.

Dalam Undang–Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 diterangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵.

¹ Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus: Indonesia–Arab; Arab-Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1971), h. 255.

² Abu Bakr Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), Cet. Ke-4, h. 574.

³ Syawaqi, dkk, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Surabaya: Indah, 1996), hal. 340.

⁴ Depdikbud, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 689.

⁵ Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Pustaka Tinta Emes, 1990), h. 7.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan idadah⁶. Sementara menurut Muhammad Bagir al-Habsyi, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami-istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram karena memenuhi persyaratan tertentu dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing dalam rangka membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin⁷.

Dari pengertian di atas dan disimpulkan pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sehingga dengan pernikahan tersebut berpeluang mendapatkan pahala dan keridhaan Allah SWT.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum perkawinan dapat ditemukan dari berbagai dalil-dalil Nash baik yang bersumber dari al-Qur'an al-Karim maupun al-Hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:

1. Dasar hukum dari al-Qur'an al-Karim

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

⁶ Abdurahman, *Kompilasi Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo. 1992), h. 114.

⁷ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis*, (Jakarta: Mizan, 2002), h. 3.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (TQS. Ar-Ruum [30] : 21) ⁸.

Dari dalil di atas, terdapat pemahaman bahwa Allah SWT telah menciptakan pasangan dari jenisnya masing-masing, hal ini dilakukan agar lahirnya sikap mengasihi dan mencitai antara pasangan tersebut. Kemudian, penciptaan pasangan tersebut merupakan suatu bentuk atau tanda dari kekuasaan Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam surah an-Nuur [24] ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (TQS. an-Nuur [24]: 32) ⁹.

Berdasarkan dalil di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan yang dilakukan tidaklah mengakibatkan seseorang menjadi miskin. Karena seorang menjadi miskin dan kaya sangat dipengaruhi oleh usaha yang dilakukannya dalam memperoleh rezki tersebut, selanjutnya ketentuan (*qadha*) dari Allah SWT. Di samping itu, dengan pernikahan akan membuka pintuk rezki dan keberkahan dari Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam dalil di atas: “Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya”.

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), h. 406.

⁹ *Ibid*, h. 354.

2. Sumber Hukum dari al-Hadits Rasulullah SAW

عَلَيْهِ
 فَإِنَّهُ , فَلْيَتَزَوَّجْ
 !
 يَا
 ,
 عَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ
 عَلَيْهِ

Artinya: “Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu"(Muttafaq Alaihi)¹⁰.

Hadits di atas memiliki pemahaman, yaitu:

1. Anjuran dan motivasi yang sangat kuat untuk menikah¹¹

Secara lahir, hadits tersebut menunjukkan wajibnya menikah bagi yang telah mampu. Tentunya yang dimaksud “mampu” ada;ah mampu baik dari segi materi (ekonomi) maupun dari segi kemampuan biologis (seksual). Pendapat inilah yang diambil oleh para ulama dari kalangan Zhahiriyah; dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Sedangkan mayoritas (jumhur) ulama dan riwayat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad mengatakan bahwa hukum menikah bagi yang telah mampu adalah sunat, bukan wajib. Tentu saja dengan syarat ia mampu menahan dirinya dari perbuatan dosa (seperti zina, onani, masturbasi, dsb). Jika tidak, maka hukum menikah menjadi wajib baginya menurut kesepakatan seluruh ulama.

¹⁰ Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughirah Al-Bukhari Abu Abdullah, *al-Jamii'u al-Musnad al-Shaheh al-Mukhtashor min Umuuri Rasul SAW wa Sunnaahihi wa Ayyaamihi*, (Masykul: Dar Thoq al-Najaah, 1422 H), h. 559.

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adhillatil Ahkaam*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.th), h. 217

Para ulama menjawab dalil Zhahiriyah dengan sabda Rasul, "Barangsiapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa". Jika berpuasa disunnahkan, maka menikah pun demikian, karena puasa adalah sebagai ganti dari menikah¹².

2. Hukum menikah bagi setiap orang berbeda-beda sesuai kondisinya, yaitu:
 - a. Wajib, bagi yang khawatir terjerumus ke dalam perbuatan dosa, sementara ia mampu menikah.
 - b. Haram, bagi yang belum mampu memenuhi kebutuhan biologis dan membahayakan kondisi pasangannya jika menikah.
 - c. Makruh, bagi yang belum membutuhkannya dan khawatir jika menikah justru menjadikan kewajibannya terbengkalai.
 - d. Sunnat, bagi yang memenuhi kriteria dalam hadits dari Abdullah Ibn Mas'ud di atas, sedangkan ia masih mampu menjaga kesucian dirinya.
 - e. Mubah, seseorang belum memiliki keinginan untuk menikah maupun penghalang apapun untuk menikah. Ia menikah bukan karena ingin mengamalkan sunnah melainkan memenuhi kebutuhan biologisnya semata, sementara ia tidak khawatir terjerumus dalam kemaksiatan¹³.

Dilihat dari segi pelaksanaannya tentang status hukum pernikahan, Qadhi Iyadh berpendapat bahwa secara umum hukum asal pernikahan adalah sunnah. Hukum asal status hukum sunnah bagi bagi setiap muslim, ketika pernikahan yang dilakukan ingin mendapatkan

¹² *Ibid*, h. 218

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 492-493.

keturunan, meskipun dengan pernikahan yang dilakukannya tidak dengan tujuan memenuhi kebutuhan biologis. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, yang artinya: "*Sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian (umatku)*", dan juga hadits-hadits yang secara lahir berisi anjuran untuk menikah.

Hadits-hadits yang berisi anjuran untuk menikah sangat banyak ditemukan, sehingga semakin menguatkan perintah dianjurkannya menikah bagi yang telah mampu, meskipun masih dapat menjaga kesucian dirinya (*tazkiyatu al-nafs*).

3. Menikah merupakan solusi yang tepat dalam mencegah tersebarnya penyakit masyarakat, yaitu perzinahan, pemerkosaan, seks bebas dan sebagainya¹⁴.
4. Hadits di atas juga menjadi dasar dan renungan bagi para pengamat aktivis dalam bidang sosial, agar memberikan perhatian serius kepada pemuda, maju atau mundurnya suatu peradaban sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh generasi muda (pemuda). Jika para pemuda di suatu komunitas memiliki kepribadian yang mulia, maka mulia dan baik pula tindakan yang dilakukannya, begitu sebaliknya¹⁵.

Dalam hadits yang lain Rasul SAW bersabda:

عَلَيْهِ (عَلَيْهِ
, عَلَيْهِ :
, فَلَيْسَ) عَلَيْهِ

¹⁴ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Op.Cit*, h. 220

¹⁵ *Ibid*, h. 221

Artinya: Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku" (Muttafaq Alaihi)¹⁶.

Rasulullah SAW juga bersabda:

وَيَنْهَى , يَأْمُرُ عَلَيْهِ : (: وَعَنْهُ
 : شَاهِدٌ وَلَهُ وَصَحَّحَهُ , وَي : شَدِيدًا نَهْيًا ,
 يَسَارٌ حَدِيثٌ أَيْضًا (الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْأَنْبِيَاءِ)

Artinya: Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga dihadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban. Hadits itu mempunyai saksi menurut riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Hibban dari hadits Ma'qil Ibnu Yasar¹⁷.

Berdasarkan dalil-dalil pernikahan yang dikemukakan di atas, baik bersumber dari al-Qur'an al-Karim maupun al-Hadits Rasulullah SAW, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan sunnah Rasul SAW dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya, dengan hukum asal pelaksanaannya adalah sunat, yaitu bila dikerjakan berpahala dan ditinggal tidak berdosa. Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu status hukum tergantung dari situasi, kondisi dan motivasi orang yang melaksanakan pernikahan itu sendiri.

C. Rukun dan Syarat Menikah

¹⁶ Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughirah Al-Bukhari Abu Abdullah, *Op. Cit.*, h. 781.

¹⁷ *Ibid*, 783.

Rukun dan syarat merupakan suatu keharusan di antaranya dalam masalah pernikahan. Ketika rukun dan syarat tidak ada sama sekali atau sebagiannya, maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Ketika rukun dan syarat tersebut terpenuhi, maka perlunya memperhatikan syarat-syarat dalam pernikahan, sehingga pernikahan yang dilaksanakan memperoleh keridhaan dan keberkahan dari Allah SWT. Adapun rukun dan syarat-syarat pernikah, sebagai berikut:

1. Rukun Pernikahan

Rukun pernikahan merupakan sesuatu yang harus ada. Dengan demikian, ketika pernikahan dilaksanakan tidak memenuhi beberapa rukun yang telah ditetapkan maka pernikahan tidak sah. Adapun rukun dalam pernikahan yaitu; (a) pengantin laki-laki, (b) pengantin perempuan, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) *ijab* dan *qabul*.

2. Syarat-Syarat Pernikahan

Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam pernikahan, adalah sebagai berikut:

- a. Syarat bagi pengantin laki-laki (calon suami), yaitu (1) tidak dipaksa atau terpaksa, (2) tidak dalam *ihram* haji atau umrah, dan (3) Islam¹⁸.
- b. Adapun syarat bagi pengantin perempuan (calon isteri), adalah (1) bukan perempuan yang dalam *iddah*, (2) tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, (3) antara laki-laki dan perempuan tidak muhrim, (4) tidak di dalam keadaan *ihram* atau haji, dan (5) bukan perempuan *musyrik*¹⁹.

¹⁸ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 455.

¹⁹ *Ibid*, h. 456.

- c. Syarat bagi seorang wali, yaitu (1) Islam, (2) laki-laki, (3) baligh dan berakal, (4) merdeka dan bukan seorang hamba sahaya, dan (5) bersifat adil²⁰.
- d. Sementara syarat bagi saksi adalah (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) akhil baligh, (4) mendengar, (5) bisa berbicara dan melihat, (6) waras (berakal), dan adil²¹.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan di atas, ketika syarat dan rukun di atas tidak terpenuhi maka pernikahan tidak sah dan dapat dibatalkan.

D. Tujuan Pernikahan

Menurut Ahmad Sarwat, ada beberapa tujuan dari pernikahan; yaitu

1. Pernikahan merupakan sunnah para Nabi dan Rasul. Hal ini sebagaimana

firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِغَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)” (TQS. ar-Ra’d [13]: 38)²².

²⁰ Ibid, h. 459..

²¹ Ibid, h. 461.

²² Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 254.

Dari ayat di atas dipahami bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk syari'at dari Allah SWT yang dibawa oleh para Rasul-Rasul-Nya. Dengan pernikahan yang dilaksanakan akan menghasilkan keturunan. Dengan demikian, tidak ada peluang bagi manusia untuk mencari pembenaran dengan tidak menikah. Hal ini akan bertentangan dengan kodrat yang ada dalam setiap manusia berupa naluri-naluri, di antaranya naluri kecenderungan terhadap sesuatu. Naluri inilah yang mendorong manusia untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

2. Pernikahan merupakan salah satu tanda-tanda dari kebesaran Allah SWT

3. Salah satu jalan untuk menjadi kaya (QS. an-Nuur [24]: 32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”²³.

4. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah dan setengah dari agama.

Dengan menikah, seseorang telah melaksanakan syari'ah dan mampu menjaga diri dari berbagai peluang kemaksiatan.

5. Supaya tidak ada yang hidup membujang. Secara fitrah manusia memiliki kecenderungan dan keinginan (naluri) untuk memiliki pasangan hidup. Hal ini salah satu ciri dari naluri kecenderungan terhadap sesuatu yang dimiliki manusia. Dengan menghindari gaya hidup membujang, merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam menghindari perzinahan. Karena perzinahan merupakan suatu perilaku yang keji dan seburuk-buruknya jalan.

6. Pernikahan merupakan ciri khas dari makhluk hidup²⁴.

²³ Ibid, h. 354.

²⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah*, (Jakarta: Mizan, 2007), h. 9-20.

Secara filosofis, menikah atau berpasangan itu adalah merupakan ciri dari makhluk hidup. Allah SWT telah menerangkan bahwa segala sesuatu diciptakan dalam bentuk berpasangan, termasuk manusia yang diciptakan Allah SWT dan memiliki pasangan satu sama lainnya. Untuk merealisasikannya dengan cara yang dibenarkan oleh Islam yaitu melalui pernikahan, bukan melalui cara-cara yang tidak dibenarkan Islam, seperti pacaran, seks bebas. Karena cara-cara tersebut merupakan bentuk dari perzinahan. Bila sampai kepada perzinahan (seperti pacaran), juga merupakan perilaku yang dilarang. Karena berpacaran merupakan jalan menuju terjadinya perzinahan.

Meskipun pada akhirnya dari perzinahan yang dilakukan berakhir dengan perkawinan. Akan tetapi, perkawinan yang dilakukan melahirkan dampak yang tidak diinginkan, seperti lahirnya anak di luar nikah, pengguguran (aborsi), dan lain-lain.

E. Hikmah Disyari'atkan Menikah

Islam adalah agama yang memerintahkan kepada setiap muslim untuk terikat dan memeluknya secara totalitas (*kaffah*). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (TQS. al-Baqarah [2] : 208)²⁵.

²⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 32.

Dari dalil di atas, sangat jelas dan tegas, bahwa perintah untuk memeluk Islam secara totalitas merupakan suatu kewajiban. Oleh karena itu, ketika seorang muslim terikat dengan Islam, maka secara otomatis kemaslahatan akan diperoleh dari keterikatan tersebut. Hal ini sebagaimana kaidah syara' yang Artinya: "Jika hukum syara' diterapkan, maka pasti akan ada kemaslahatan²⁶."

Berdasarkan uraian di atas, bila dihubungkan dengan pernikahan, dapat dipahami bahwa disunnahkannya menikah, maka sunnah tersebut terdapat kemaslahatan dalam pengamalannya, yaitu:

1. Melestarikan manusia dengan perkembangbiakan yang dihasilkan melalui pernikahan.
2. Kebutuhan suami isteri kepada pasangannya untuk menjaga kemaluannya dengan melakukan hubungan seks yang fitriyyah.
3. Kerjasama suami isteri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya.
4. Mengatur hubungan laki-laki dengan perempuan berdasarkan asas pertukaran hak dan saling kerjasama yang produktif dalam suasana cinta kasih dan perasaan saling menghormati yang lain²⁷.
5. Mayambung silahtuhrahmi.
6. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh.
7. Dengan perkawinan di antaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan²⁸.

²⁶ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), h. 41.

²⁷ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim* (terj), Diterjemahkan oleh Fadhl Bahri, (Bekasi: Darul Falah, 2009), cet. Ke-16, h. 574 – 575.

Beberapa hikmah menikah di atas, senada dengan hikmah pernikahan yang ditulis oleh Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah dalam *Kitab Fiqih Wanita*. Dalam merumuskan hikmah pernikahan, ia mengawali pembahasan tentang firman Allah SWT dalam surat ar-Ruum [30] ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (TQS. Ar-Ruum [30] : 21)²⁹.

Pernikahan menjadi proses keberlangsungan hidup manusia di dunia dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi untuk menyalurkan kebutuhan biologis satu sama lain (baik laki-laki maupun perempuan) melalui hubungan suami isteri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan.³⁰ Dari Abu Hurairah *Radhiallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda:

شَيْطَانُ شَيْطَانُ
أَهْلُهُ فَلْيَأْتِ يَرِدْ فَسْه ()

Artinya: Sesungguhnya wanita itu apabila menghadap ke depan berbentuk syetan dan menghadap ke belakang juga berbentuk syetan. Karenanya, jika salah seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang menakjubkan pandangannya, maka hendaklah ia segera mendatangi isterinya. Yang demikian itu agar dapat mengendalikan gejolak yang ada di dalam dirinya. (HR. Muslim)³¹

²⁸ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 20-21.

²⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 406.

³⁰ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *al-Jami’ fi Fiqh an-Nisaa’*, Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghaffar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), h. 379.

³¹ Muslim Bin al-Hajj Abu al-Husin al-Qasyiriy al-Naisaburiy, *Shaheh Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Arabiyy, t.th), h. 110.

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, memdidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajiban dengan baik untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi.³²

³² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Loc. Cit.*

BAB IV
TRADISI NIKAH NAIK ANTARA LAKI-LAKI
YANG SUDAH BERKELUARGA DENGAN SEORANG GADIS
DAN DAMPAKNYA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KEPENGHULUAN BAGAN PUNAK PESISIR
KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR)

A. Bentuk Pelaksanaan Nikah Naik Di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir
Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Bagan Punak Pesisir merupakan salah satu Kepenghuluan yang terletak di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Dilihat dari keadaan sosial dan budaya di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir masih ditemukan berbagai bentuk tradisi atau kebiasaan yang berkembang, di antaranya tradisi nikah naik.

Secara bahasa “tradisi” berasal dari bahasa latin, dengan asal kata “*traditio*”, memiliki makna “diteruskan” atau “kebiasaan”¹. Secara istilah tradisi adalah “sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama”². Menurut Depdiknas, tradisi adalah “adat istiadat atau kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat”³.

Sementara menurut Muhammad Abed al-Jabiri, tradisi adalah “sesuatu yang hadir dan menyertai kekinian kita yang berasal dari masa lalu kita atau orang lain, baik masa lalu jauh maupun dekat”⁴. Menurut tradisi sebagai sesuatu yang hadir dan menyertai kekinian, maka mengangkat dan

¹ <http://www.wikipedia.com-pengertiantradisi/27/10/2011//>

² <http://www.wikipedia.com-pengertiantradisi/27/10/2011//>

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 539.

⁴ <http://suaramerdeka.com/harian/01/05/2011//>

menyibukkan diri dengan tradisi adalah masalah yang *absah* dan bisa dibenarkan. Sebab, tradisi merupakan bagian esensial atau yang mendasari kebutuhan manusia untuk mengkaji dirinya dan mengembangkannya⁵.

Dari pengertian di atas, dipahami bahwa tradisi sebagai jalan yang menginformasikan bagaimana menempuh pendakian dari tingkat eksistensi yang lebih rendah ke tingkat eksistensi yang lebih tinggi melalui pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Kemudian dari pengertian di atas juga dipahami bahwa tradisi adalah segala sesuatu yang dilakukan sejak lama oleh generasi sebelumnya dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat sehingga menjadi turun temurun dan diwariskan serta dilestarikan sampai saat.

Dalam tradisi yang berkembang di masyarakat terdapat dua dimensi, yaitu (1) dimensi isotorik, dan (2) dimensi eksotorik. Dimensi isotorik, merupakan dimensi yang berhubungan dengan kebutuhan spiritual dan intelektual yang ingin mencari Pencipta atau realitas *ultim*. Dimensi isotorik hanya dapat diselami oleh orang-orang dengan kualifikasi khusus yang disebut dengan *ho eso anthropos*. Sementara dimensi eksotorik, merupakan dimensi yang mengatur keseluruhan kehidupan masyarakat secara tradisional, dalam bidang agama dikenal dan diwujudkan dengan aktivitas ritual atau simbol-simbol tertentu dan yang telah disepakati serta biasa digunakan⁶.

Selanjutnya, dalam membahas tentang nikah naik yang ada di masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, maka nikah naik dapat dikategorikan salah satu bentuk tradisi. Karena nikah naik merupakan kebiasaan yang sudah sejak dahulu. Dimana, nikah naik merupakan suatu

⁵ <http://suaramerdeka.com/harian/01/05/2011//>

⁶ <http://www.tumbir.com/tagget/tradisi/01/05/2011//>

cara yang dilakukan oleh generasi terdahulu dan juga sebagai solusi dari permasalahan ekonomi bagi kaum laki-laki yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan uang hantaran dalam pernikahan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sabaruddin.⁷

Menurut Muhammad Qohar, bahwa terjadi pergeseran nilai antara pelaksanaan tradisi nikah naik yang terjadi pada masa dahulu dengan fakta dan kondisi sekarang. Pergeseran tersebut, dapat dilihat dari motivasi baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan nikah naik tersebut. Pada masa dahulu, motivasinya murni disebabkan oleh pihak laki-laki tidak mampu memberikan uang hantaran yang disertai dalam pernikahan. Sementara, fakta dan kondisi sekarang motivasinya tidak hanya sekedar dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pergaulan yang berakhir dengan melakukan perzinahan dan hubungan pacaran yang sudah berjalan lama, sehingga tidak ada kata-kata atau keinginan untuk mewujudkannya ke jenjang pernikahan.⁸

Selanjutnya, pelaksanaan tradisi nikah naik yang dilakukan oleh masyarakat dahulu berbeda dari segi pelakunya dengan pelaksanaan yang dilakukan pada masa sekarang. Pada masa dahulu, tradisi nikah naik hanya dilakukan bagi laki-laki belum menikah (bujang) dengan perempuan yang juga berstatus belum menikah (gadis). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pada kondisi sekarang, tradisi nikah naik juga terjadi dan dilaksanakan antara seorang laki-laki yang sudah beristeri dan bahkan sudah memiliki anak

⁷ Sabaruddin, (Masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir), *wawancara*, 12 Maret 2011.

⁸ M. Qohar, (Masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir), *wawancara*, 12 Maret 2011.

dengan seorang perempuan yang belum menikah (gadis). Untuk lebih jelas pelaksanaan tradisi nikah naik yang terjadi antara laki-laki yang sudah beisteri dengan seorang gadis dapat dilihat dalam uraian angket penelitian, berikut ini:

Tabel IV.1
Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I Mengetahui
Tentang Adanya Tradisi Nikah Naik

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Tahu	20	100,00%
2	Kurang tahu	-	-
3	Tidak tahu	-	-
	Jumlah	20	100,00%

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian, Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 20 orang responden, 100,00% menjawab mengetahui tentang adanya nikah naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, dan tidak ada diantara responden menjawab kurang tahu atau tidak tahu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tradisi nikah naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir diketahui oleh masyarakat.

Selanjutnya, dari tabel di atas, didukung hasil wawancara dengan Syarifuddin bahwa nikah naik yang terjadi di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir dapat dikategorikan kedalam dua bentuk, yaitu:

1. Nikah naik yang terjadi antara pasangan yang belum menikah baik laki-laki maupun perempuan
2. Nikah naik yang terjadi antara pasangan yang sudah menikah, yaitu salah satu dari pasangan yaitu pihak laki-laki yang sudah berstatus menikah.⁹

Hasil wawancara dengan Syarifuddin, didukung dengan hasil angket pada tabel berikut ini:

⁹ Syarifuddin, (Tokoh Masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir), wawancara, 11 Oktober 2011.

Tabel IV.2
Apakah Nikah Naik Hanya Terjadi Antara Laki-Laki
Dan Perempuan Yang Belum Menikah Saja

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Ya	-	-
2	Tidak	20	100,00%
3	Tidak tahu	-	-
	Jumlah	20	100,00%

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian, Tahun 2011.

Dari tabel di atas dipahami bahwa dari 20 orang responden, keseluruhannya menjawab bahwa nikah naik tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah saja. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pelaksanaan nikah naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir tidak hanya terjadi antara pasangan laki-laki dan perempuan yang berstatus belum menikah, akan tetapi ada juga terjadi antara pasangan yang salah satunya sudah menikah. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya nikah naik antara laki-laki yang sudah beristeri dengan perempuan yang masih gadis, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.3
Apakah Faktor Penyebab Laki-Laki yang Sudah Beristeri
Melakukan Nikah Naik

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Keinginan berpoligami	8	40,00 %
2	Tradisi di masyarakat	1	5,00%
3	Perzinahan	11	55,00%
	Jumlah	20	100,00%

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian, Tahun 2011.

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 20 orang responden, 3 orang di antaranya menjawab bahwa pelaksanaan nikah naik yang dilakukan oleh laki-laki yang sudah menikah disebabkan oleh keinginan untuk berpoligami, dengan persentase 40,00%, 1 orang menjawab bahwa pelaksanaan nikah naik yang dilakukan oleh laki-laki yang sudah menikah disebabkan oleh tradisi di masyarakat, dengan persentase 5,00%, dan 11 orang responden menjawab bahwa pelaksanaan nikah naik yang dilakukan oleh laki-laki yang sudah menikah disebabkan oleh perzinahan, dengan persentase 55,00%. Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa nikah naik yang dilakukan oleh laki-laki yang sudah menikah di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir disebabkan oleh perzinahan (55,00%)

Menurut Muhammad Qohar, umumnya terjadi perzinahan antara seorang gadis dengan laki-laki yang berstatus sudah menikah, yang berakhir dengan nikah naik (pernikahan). Kondisi demikian terjadi, disebabkan laki-laki yang sudah menikah dan melakukan nikah naik merahasiakan status yang pernikahannya. Dengan menyembunyikan status tersebut, pihak perempuan beranggapan bahwa laki-laki tersebut tidak suami orang, sehingga di antara mereka terjalin hubungan pacaran, dan sampai kepada melakukan perzinahan.¹⁰

Hasil wawancara dengan Muhammad Qohar didukung dan dijelaskan lebih lanjut oleh Baharuddin, yaitu pada umumnya ketika nikah naik terjadi, faktor utama yang melatarbelakanginya disebabkan perzinahan yang telah

¹⁰ M. Qohar, (Masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir), *wawancara*, 13 Oktober 2011.

dilakukan. Faktor tersebut tidak hanya melatarbelakangi nikah naik yang terjadi antara laki-laki yang sudah menikah saja, akan tetapi juga menjadi latar belakang nikah yang di kalangan remaja atau antara pasangan bujang dan gadis¹¹.

Di samping faktor perzinahan, keinginan untuk berpoligami juga penyebab terjadinya tradisi nikah naik di masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir. Selain faktor di atas, penyebab terjadinya nikah naik juga disebabkan karena faktor ekonomi. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4
Apakah Faktor Ekonomi
Juga Menjadi Penyebab Terjadinya Nikah Naik

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Ya	12	60,00%
2	Tidak	5	25,00%
3	Tidak tahu	3	15,00%
	Jumlah	20	100,00%

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian, Tahun 2011

Dari tabel di atas, diketahui bahwa 12 orang responden dengan persentase 60,00% menjawab “ya”, artinya faktor ekonomi merupakan faktor yang penyebab terjadinya nikah naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, 5 orang responden dengan persentase 25,00% menjawab “tidak”, artinya faktor ekonomi bukan merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadi nikah naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, dan 3 orang

¹¹ Baharuddin. Z, (Tokoh Masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir), wawancara, 11 Maret 2011.

responden dengan persentase 15,00% menjawab “tidak tahu”, artinya di antara responden masih ada yang tidak mengetahui bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab yang mendorong terjadi nikah naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir. Dari persentase dalam tabel di atas, mayoritas responden mengetahui bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah naik disebabkan oleh faktor ekonomi (60,00%).

Persentase tingkat pengetahuan masyarakat tentang faktor ekonomi yang melatarbelakangi terjadinya nikah naik di masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, bertolak belakang dari hasil wawancara Rina, bahwa faktor ekonomi merupakan faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah naik antara laki-laki dan perempuan yang masing belum menikah (bujang dan gadis), dan tidak terhadap laki-laki yang berstatus sudah menikah dengan seorang gadis. Akan tetapi faktor yang mendorong terjadi nikah naik tersebut disebabkan oleh faktor perzinahan¹².

Faktor ekonomi yang melatarbelakangi terjadinya nikah naik antara laki-laki dan perempuan yang masing belum menikah, karena besarnya uang hantaran yang harus disiapkan dan diserahkan oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Adapun besarnya hantaran tersebut minimal Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) hingga 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Di sisi lain, dari keadaan tingkat perekonomian masyarakat di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, dimana sulitnya mendapat pekerjaan yang dapat menghasilkan besarnya uang hantaran yang harus dikeluarkan¹³.

¹² Rina (Masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir), *wawancara*, 12 Oktober 2011

¹³ Rina (Masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir), *wawancara*, 12 Oktober 2011

Selanjutnya, dari hasil observasi yang dilakukan, ditemukan beberapa respon dari masyarakat tentang tradisi nikah naik yang terjadi antara seorang gadis dengan laki-laki yang sudah menikah, yaitu ada yang menerima, bersifat netral dan menolak pelaksanaan tradisi nikah tersebut. Hasil observasi ini, didukung jawaban angket penelitian dalam tabel berikut:

Tabel IV.5
Respon Masyarakat terhadap Nikah Naik

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Menerima	7	35,00%
2	Netral	-	-
3	Menolak	13	65,00%
	Jumlah	20	100,00%

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian, Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 20 orang responden, 7 orang di antaranya dengan persentase 35,00% menerima keberadaan tradisi nikah naik antara seorang gadis dengan laki-laki yang sudah menikah, tidak ada di antara responden yang menjawab netral, sementara 13 orang responden dengan persentase 65,00% menolak adanya tradisi nikah naik antara seorang gadis dengan laki-laki yang sudah menikah. Dari persentase diperoleh, diketahui bahwa mayoritas responden menjawab menolak (65,00%). Persentase tentang respon masyarakat tersebut senada dengan hasil wawancara dengan Sabaruddin, yaitu:

1. Tradisi nikah naik yang terjadi antara seorang gadis dengan laki-laki yang sudah menikah merupakan suatu hal yang tidak layak untuk dilakukan oleh seorang laki-laki yang berstatus sudah berumah tangga, karena laki-laki tersebut secara sah sudah mempunyai isteri, dan/atau sudah memiliki anak

2. Tradisi nikah naik terjadi karena antara seorang gadis dengan laki-laki yang sudah menikah telah melakukan perzinahan, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dengan melakukan nikah naik
3. Meskipun agama membolehkan berpoligami, akan tetapi seseorang suami harus mampu berlaku adil.
4. Tradisi nikah naik akan dipandang wajar, ketika yang melakukan tradisi ini adalah antara pasangan seorang bujang dan gadis¹⁴.

Hasil wawancara dengan Sabaruddin di atas, sejalan dengan respon dari para isteri terhadap nikah naik yang terjadi antara seorang gadis dengan laki-laki yang sudah beristeri, sebagaimana hasil wawancara berikut:

Menurut Santi, sangat menolak dan tidak menginginkan kalau nikah naik dilakukan oleh laki-laki yang sudah menikah dengan seorang gadis. Respon tersebut disebabkan oleh: (a) tidak menginginkan mengalami hidup dipoligami, karena para yakin bahwa suami mereka tidak dapat berlaku adil; (b) akan terkesan bahwa isteri kurang bertanggung jawab dan tidak bisa menjalankan fungsi serta tugasnya bagi seorang isteri; (c) khawatir bahwa ketika suaminya berpoligami mempengaruhi perkembangan mental, fisik, dan pertumbuhan anak-anaknya.¹⁵

Dari respon para isteri tentang pelaksanaan nikah naik yang dilakukan oleh suaminya, pada dasarnya respon tersebut bukan karena tradisi itu sendiri melainkan para isteri tidak menginginkan kehidupan poligami dalam rumah

¹⁴ Sabaruddin (Masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir), *wawancara*, 13 Oktober 2011.

¹⁵ Santi, (Masyarakat di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir), *wawancara*, 12 Oktober 2011

tangga. Kemudian, dari beberapa penyebab para isteri menolak tradisi nikah naik, maka dapat dipahami bahwa sekiranya para suami mampu berlaku adil dengan anggota keluarganya baik terhadap isteri maupun anak-anak, maka para isteri akan menerima tradisi tersebut.

B. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Nikah Naik Di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Dalam setiap perbuatan yang dilakukan, maka dapat dipastikan terdapatnya dampak yang ditimbulkan baik bersifat positif maupun negatif. Dengan demikian dalam dapat pula dipastikan adanya dampak yang dihasilkan dari tradisi nikah naik yang terjadi antara laki-laki yang sudah menikah dengan seorang gadis di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir. Untuk mengetahui dampak tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV.7
Dampak Tradisi Nikah Naik
Terhadap Keluarga Besar Kedua Belah Pihak

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Ada	17	85,00%
2	Tidak ada	-	-
3	Tidak tahu	3	15,00%
	Jumlah	20	100,00%

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian, Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 20 orang responden, 17 orang di antaranya menjawab adanya dampak yang dihasilkan dari tradisi nikah naik dengan persentase 85,00%, tidak ada di antara responden menjawab bahwa dalam tradisi nikah naik tidak menghasilkan dampak terhadap keluarga dengan persentase 0%, dan 3 orang responden

menjawab bahwa tidak mengetahui sama sekali bahwa dari tradisi nikah naik menghasilkan dampak terhadap keluarga dengan persentase 10,00%. Dari persentase yang diperoleh dalam tabel di atas, diketahui bahwa mayoritas responden menjawab tradisi nikah naik memiliki dampak terhadap kedua belah pihak (suami–isteri) yang melakukan nikah naik, dan juga keluarganya.

Selanjutnya, persentase dalam tabel di atas, senada dengan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Dampak bagi pihak perempuan yang melakukan nikah naik

Adapun dampak yang ditimbulkan dari tradisi nikah naik yang terjadi antara seorang gadis dengan laki-laki yang berstatus sudah berumah tangga di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, yaitu bila dilihat secara psikologis, perempuan tersebut merasa malu kenyataan dari kondisi yang dialami karena tidak mengetahui fakta sebenarnya dari laki-laki yang menikahkan dirinya. Kemudian, dari tindakan yang telah dilakukan dengan meminta pertanggung jawaban laki-laki yang sudah menikah dengan menikahkan dirinya, sehingga perempuan tersebut harus menghadapi kenyataan hidup dengan kondisi menjadi isteri kedua (poligami). Selanjutnya, dari nikah naik yang dilakukan terkesan bahwa perempuan yang menjadi pasangan naik naik telah mengambil suami orang. Meskipun, sebelum melakukan nikah naik, ia tidak mengetahui sama sekali status laki-laki tersebut.¹⁶

¹⁶ Ria Mahmud (Masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir), *wawancara*, 10 Maret 2011.

Menurut Rina, sekiranya ia mengetahui kalau laki-laki tersebut sudah beristeri, maka ia tidak akan memintai pertanggung jawaban dari laki-laki tersebut dengan melanjutkan ke jenjang pernikahan, dan tidak hanya itu dilakukan, ia pun tidak akan menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki tersebut.¹⁷

Dari kondisi dan kenyataan yang dialami oleh perempuan yang melakukan nikah dengan laki-laki yang sudah beristeri, sehingga menimbulkan celaan dari masyarakat secara umum. Namun, celaan tersebut tidak ditemukan dan masyarakat akan menilai sesuatu yang biasa, ketika nikah naik terjadi antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berstatus belum menikah (bujang dan gadis).¹⁸ Hal ini senada dengan hasil angket berikut:

Tabel IV.8
Apakah Nikah Naik
Merupakan Aib di Masyarakat

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Ya	12	60,00%
2	Tidak	3	15,00%
3	Tidak tahu	5	25,00%
	Jumlah	20	100,00%

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian, Tahun 2011

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa 12 orang responden menjawab “ya” dengan persentase 60,00%, sehingga dapat dipahami bahwa nikah naik yang terjadi antara laki-laki yang sudah menikah dengan seorang gadis merupakan aib di masyarakat, 3 orang responden menjawab “tidak”

¹⁷ Rina (Masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir), wawancara, 12 Oktober 2011

¹⁸ Rina (Masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir), wawancara, 12 Oktober 2011

dengan persentase 15,00%, sehingga dapat dipahami bahwa nikah naik yang terjadi antara laki-laki yang sudah menikah dengan seorang gadis tidak tergolong aib di masyarakat, dan 5 orang responden menjawab “tidak tahu” dengan persentase 25,00%, dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui bahwa nikah naik yang terjadi antara laki-laki yang sudah menikah dengan seorang gadis tergolong aib atau tidak di masyarakat.

2. *Dampak bagi anak*

Dampak yang dihasilkan dari nikah naik yang terjadi antara seorang gadis dengan laki-laki yang sudah menikah dan memiliki anak. Dengan demikian, dampak dari nikah naik tersebut tidak hanya dialami isteri akan tetapi juga anak yang dihasilkan dari pernikahan sebelumnya.

Dampak nikah naik bagi isteri (isteri pertama), dimana dengan nikah naik yang dilakukan oleh suaminya, sehingga secara psikologis perasaan seorang isteri akan sakit. Meskipun dengan kondisi terpaksa ia menerima tindakan yang dilakukan oleh suaminya. Dengan tidak didasari atas kerelaan isteri dari nikah naik (poligami) yang dilakukan suami, maka akan mempengaruhi terhadap keharmonisan hubungan suami isteri dalam rumah tangga, dan banyak juga diakhiri dengan perceraian dari hubungan pernikahan dengan isteri pertama. Adapun dampak dari nikah naik terhadap anak, dimana anak akan mengalami rusak mental, dan lain sebagainya. Karena seorang ayah tidak mampu berlaku adil dan bijaksana terhadap anggota keluarga. Seorang ayah kurang memberikan perhatian dan bahkan tidak sama sekali terhadap perkembangan anak-anaknya.¹⁹

¹⁹ Ria Mahmud (Masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir), *wawancara*, 10 Maret 2011.

Dengan demikian dari tradisi nikah naik tersebut berdampak negatif terhadap isteri dan anak-anak dalam keluarga. Kondisi demikian, senada dengan hasil angket dalam tabel berikut:

Tabel IV.9
Dampak yang Ditimbulkan
Dari Nikah Naik terhadap Anak

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Terjadinya kenakalan remaja	4	20,00%
2	Terjadinya pergaulan bebas	7	35,00%
3	Anak yang lahir di luar nikah	9	45,00%
	Jumlah	20	100,00%

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian, Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 orang responden menjawab bahwa tradisi nikah naik dampaknya terhadap anak adalah mengakibatkan terjadinya kenakalan remaja, dengan persentase 20,00%, 7 orang responden menjawab mengakibatkan terjadinya pergaulan bebas, dengan persentase 35,00%, 9 orang responden menjawab mengakibatkan banyaknya anak lahir di luar nikah, dengan persentase 45,00%. Dari persentase pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi nikah naik lebih berdampak negatif terhadap anak seperti kenakalan pada anak, pergaulan bebas anak dan banyaknya anak lahir di luar nikah.

Di samping itu, tradisi nikah naik yang terjadi antara seorang gadis dengan laki-laki yang sudah menikah merupakan salah satu bentuk aib yang ada di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Di sisi lain, tradisi nikah naik yang terjadi antara seorang gadis dengan laki-laki yang berstatus sudah berumah tangga juga terdapat beberapa dampak lain. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.10
Dampak Nikah Naik Yang Terjadi Antara Laki-Laki
Dengan Seorang Gadis

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Konflik antarkeluarga	7	35,00%
2	Bersatunya dua keluarga	6	30,00%
3	Dikucilkan dari keluarga	7	35,00%
	Jumlah	20	100,00%

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian, Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 20 orang responden, 7 orang responden menjawab bahwa nikah naik yang terjadi antara laki-laki dengan seorang gadis mengakibatkan terjadinya konflik antar keluarga, dengan persentase 35,00%, 6 orang responden menjawab bahwa nikah naik yang terjadi antara laki-laki dengan seorang gadis mengakibatkan bersatunya dua keluarga, dengan persentase 30,00%, 7 orang responden menjawab bahwa nikah naik yang terjadi antara laki-laki dengan seorang gadis mengakibatkan dikucilkan dari keluarga, dengan persentase 35,00%. Dari persentase di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab bahwa nikah naik yang terjadi antara laki-laki dengan seorang gadis mengakibatkan konflik antar keluarga dan dikucilkan dari keluarga, masing-masing dengan persentase 35,00%.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari tradisi nikah naik yang terjadi antara seorang gadis dengan laki-laki yang sudah beristeri di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, yaitu banyaknya anak lahir di luar nikah, merupakan aib di masyarakat, konflik antar keluarga, dan dikucilkan dari keluarga, kenakalan remaja, dan pergaulan bebas. Sedangkan dampak positifnya hampir tidak ada, kecuali bersatunya dua keluarga.

Di samping itu, dari hasil observasi dan wawancara penulis, ditemukan beberapa kasus nikah naik yang dilakukan antara seorang laki-laki berstatus sudah beristeri dengan seorang gadis di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, di antaranya adalah:

1. Pernikahan antara Maanor dengan Sinta yang terjadi pada tanggal 11 November 2010 yang dilakukan di P3NTR Kepenghuluan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Pernikahan yang dilakukan antara kedua pasangan tersebut tidak mendapatkan izin dari Ratih (isteri pertama Maanor). Sebelumnya Ratih tidak memberikan izin dan menolak pernikahan yang dilakukan Maanor. Tetapi, Ratih terpaksa harus mengizinkan, bila tidak Ratih akan diceraikan oleh Maanor. Dengan pertimbangan anak yang masih kecil, maka Ratih mengizinkan Maanor untuk menikah dengan Sinta. Akhirnya Ratih siap dipoligami Maanor hingga sekarang.
2. Pernikahan antara Herman dengan Eva Susanti yang terjadi pada tanggal 25 Februari 2011. Pernikahan yang dilakukan membuat mengakibatkan konflik antara Herman dengan keluarga Ipau (isteri pertama Herman). Dalam hal ini, pernikahan Herman dengan Eva Susanti mendapat penolakan keras dari isteri pertamanya (Ipau). Dan Ipau siap diceraikan, bila Herman menikahi Eva. Tetapi, dengan pertimbangan lain pernikahan Herman dan Eva tetap dilaksanakan, karena Eva Susanti sudah hamil. Akhir, Herman dan Eva Susanti bercerai setelah Eva melahirkan anaknya.
3. Pernikahan antara Thoyyib dengan Yanti yang terjadi pada tanggal 05 Mei 2011. Pernikahan dari kedua pasangan tersebut ditolak keras dari isteri pertama Thoyyib (Ernawati). Karena Ernawati tidak siap dipoligami dan menerima tindakan yang dilakukan Thoyyib. Karena pertimbangan mendesak, akhirnya pernikahan Thoyyib dengan Yanti tetap dilaksanakan dalam kondisi tidak mendapatkan izin dari Ernawati. Akhirnya

pernikahan Thoyyib dengan Yanti dilaksanakan tidak didepan KUA atau P3NTR. Dimana, pernikahannya dilakukan secara *sirri* (*underhand*), yang dipimpin oleh keluarga dari pihak Yanti. Namun, pernikahan tersebut tidak bertahan lama, dimana Thoyyib dan Yanti tidak tinggal bersama setelah pernikahan dilangsungkan.

4. Pernikahan antara Jhoni dengan Lisnawati yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2011. Pernikahan antara kedua pasangan tersebut mendapatkan menolakan dan memperoleh izin dari Leni selaku isteri pertama Jhoni. Adapun, Leni mengizinkan pernikahan Jhoni dengan Lisnawati, karena Leni menyadari pernikahannya dengan Jhoni belum menghasilkan anak. Adapun lamanya hubungan pernikahan mereka sudah 11 tahun. Akhirnya mereka hidup berdampingan dalam keluarga hingga sekarang.

Dari beberapa kasus pernikahan antara laki-laki dengan seorang gadis di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir di atas, dapat dipahami bahwa sebagian besar pernikahan yang dilaksanakan tidak memperoleh izin dan ditolak oleh isteri. Meskipun pada kenyataannya pernikahan tersebut tetap dilaksanakan.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Nikah Naik Dan Dampaknya Di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Hukum Islam adalah seruan Allah SWT yang berkaitan dengan amal perbuatan hamba (manusia), baik ketetapan yang sumbernya pasti (*qath'i tsubut*), seperti al-Qur'an dan al-Hadits mutawatir, maupun ketetapan yang sumbernya masih dugaan kuat (*zhanni tsubut*), seperti hadits yang bukan tergolong mutawatir.²⁰ Dari pengertian hukum Islam di atas, dipahami bahwa ada hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara yang *qath'i* (pasti) dan *zhanni* (masih dugaan kuat), baik *qathi'* maupun *zhanni* tetapi masih tetap bersumber dari sumber yang pasti, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.

²⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Peraturan Hidup Dalam Islam* (terj), Abu Amin, dkk, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001), h. 108.

Selanjutnya, dalam masalah hukum, ada hukum lingkup benda, dan perbuatan. Hukum asal dari benda adalah *mubah* (boleh) selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Sementara hukum asal dari perbuatan, selalu terikat dengan hukum syara', sebagaimana dijelaskan oleh kaidah syara':

التقييد

Artinya: Asal dari perbuatan manusia terikat dengan hukum syara'.²¹

Yang dimaksud dengan terikatnya kepada hukum syara' adalah terikat kepada hukum *taklifi* yaitu *fardhu* atau wajib, haram, mandub, makruh dan mubah. *Fardhu* () atau wajib adalah seluruh perbuatan yang mendapatkan pujian bagi pelakunya, dan celaan bagi yang melanggarnya. Sedangkan haram () adalah perbuatan yang mendapatkan celaan bagi pelakunya, dan pujian bagi yang meninggalkannya. Adapun yang dimaksud dengan *mandub* () adalah pujian bagi pelakunya, tetapi tidak mendapatkan celaan bagi yang meninggalkannya. Sedangkan, makruh adalah pujian bagi yang meninggalkannya, atau meninggalkannya lebih utama dari pada melakukannya. Sementara mubah adalah apa yang dituju oleh dalil

(wahyu) terhadap seruan Allah SWT yang di dalamnya terdapat pilihan antara melakukan atau meninggalkannya²².

Dari pembagian hukum (hukum benda dan hukum perbuatan) di atas, maka dapat kategorikan bahwa tradisi nikah naik yang terjadi antara seorang gadis dengan laki-laki yang sudah menikah di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, termasuk dalam area hukum perbuatan, yang senantiasa selalu terikat

²¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992), h. 99.

²² Taqiyuddin an-Nabhani, *Op. Cit*, h. 112-113.

dengan hukum syara. Dengan demikian, perlunya ditemukan status hukum dari tradisi nikah naik tersebut. Agar setiap yang dilakukan benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah SWT. Artinya, bila tradisi nikah naik berstatus hukum wajib, maka harus segera dilaksanakan, dan sebaliknya bila status hukum dari tradisi tersebut berstatus hukum haram, maka segera ditinggalkan, begitu seterusnya, ketika status sunnah (*mandub*), *mubah*, atau *makruh*.

Dalam menganalisis tradisi nikah naik yang terjadi antara laki-laki yang sudah menikah dengan seorang perempuan atau gadis di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, maka dapat dianalisis melalui dua aspek, yaitu:

1. *Bentuk Pelaksanaan Nikah Naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir*

Pembahasan sebelumnya dalam pemaparan data-data dari hasil penelitian, sehingga dalam menganalisis perspektif hukum Islam dari pelaksanaan tradisi nikah di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian, seperti:

Telah diketahui sebelumnya, bahwa nikah naik yang terjadi antara laki-laki yang sudah menikah dengan seorang perempuan (gadis) di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir dilatarbelakangi oleh faktor perzinahan yang dilakukan. Hal ini dapat diketahui dari persentase jawaban angket penelitian dengan persentase 55,00%.

Menurut Kompleksi Hukum Islam (KHI) pasal 53 ayat 1, 2, dan 3, dijelaskan bahwa kawin hamil, sebagai berikut: (1) seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) perkawinan dengan perempuan hamil yang disebut dalam ayat (1)

dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dalam dilangsungkannya perkawinan pada saat perempuan hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²³

Penjelasan dalam KHI dalam pasa 53 ayat 1,2 dan 3 di atas, membahas ketentuan umum tentang dibolehkannya perkawinan dengan perempuan hamil sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut di atas.

Para Imam Mazhab juga berpendapat dan bersepakat bahwa bolehnya pernikahan akibat perzinahan. Pendapat ini berbeda yang diriwayatkan dari Ali r.a dan Hasan al-Bashri bahwa dalam pernikahan akibat perzinahan tidak sah dan batal.²⁴

Menurut Hanafi dan Syafii, suami dibolehkan langsung mencampuri perempuan yang telah menjadi isterinya tanpa harus menunggu *iddah*. Akan tetapi jika perempuan tersebut hamil, maka makruh baginya menyetubuhi perempuan tersebut sampai melahirkan. Adapun menurut Maliki dan Hambali, “diwajibkan menunggu masa *iddah*, dan diharamkan atas suaminya menyetubuhi hingga habis masa *iddah*-nya”. Sementara menurut Abu Yusuf: “apabila perempuan itu hamil, maka haram menikahnya hingga ia melahirkan, sedangkan jika perempuan tersebut tidak hamil, maka tidak haram menikahnya dan ia pun tidak perlu menunggu masa *iddahnya*.²⁵

²³ Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Perundang-Undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), h. 20.

²⁴Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (terj), ‘Abdul Zaki al-Kaf, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), h. 349.

²⁵ *Ibid*

Dari pendapat ulama yang penulis kutip dalam analisis ini, secara umum bahwa pernikahan akibat perzinahan dibolehkan, hanya saja perlu diperhatikan sebelum pernikahan dilaksanakan, apakah perempuan tersebut sedang hamil atau tidak. Bila perempuan tersebut hamil, maka laki-laki boleh menikahnya, akan tetapi laki-laki tersebut harus menunggu masa *iddah*-nya dan sampai selesainya masa *iddah* tersebut, baru ia dibolehkan menggauli perempuan tersebut. Namu, bila perempuan tersebut tidak dalam kondisi hamil, maka dibolehkan menikahi tanpa menunggu masa *iddah* dalam menggaulinya. Begitu juga halnya dalam pelaksanaan nikah naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, bahwa pernikahan tersebut dibolehkan selama terpenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan serta memperhatikan kondisi dan keadaan yang sedang dialami oleh wanita tersebut (hamil atau tidak). Akan tetapi, bila dilihat dari penyebabnya pernikahan tersebut, maka tradisi nikah yang terjadi antara laki-laki yang sudah beristeri dengan seorang perempuan (gadis), maka tradisi ini bertentangan dengan hukum Islam. Karena, terjadinya tradisi tersebut dilatarbelakangi oleh faktor perzinahan yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut.

Dalam pandangan hukum Islam, perzinahan merupakan suatu perilaku yang dilarang dan diharamkan. Dengan demikian, Islam memberikan tindakan pencegahan sehingga tidak terjadinya perzinahan, dengan cara menghindari dan tidak mendekati perzinahan itu sendiri. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (TQS. *al-Israa’* [17]: 32)²⁶

Dari dalil di atas, sangat jelas dan tegas bahwa Allah SWT melarang dan mendekati perzinahan. Karena perzinahan adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk, dimana dari perzinahan yang dilakukan menghasilkan dampak negatif, seperti lahirnya anak di luar nikah, menyebarnya virus HIV/AIDS, banyaknya aborsi dilakukan, terjadinya pernikahan yang tidak berkah, dan lain sebagainya. Dengan demikian wajar, bahwa Allah SWT menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku perzinahan, baik pelakunya masih bujang (*muhsan*) maupun yang sudah berumah tangga (*ghairu muhsan*).

Ketika perzinahan tersebut dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing belum berstatus berkeluarga, maka akan dikenakan sanksi berupa dicambuk (*jilid*) sebanyak seratus kali, sebagaimana firman Allah SWT:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman” (TQS. *An-Nuur* [24]: 2)²⁷

²⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), h. 285.

²⁷ *Ibid*, h.

Dalil di atas menjelaskan secara tegas bahwa para pelaku zina yang pelakunya belum berumah tangga, maka dikenakan sanksi cambuk (*jilid*) sebanyak seratus kali cambukan. Menurut ulama dalam membahas ayat ini, bila dari keduanya masih hidup setelah melewati proses cambuk sebanyak seratus kali, maka keduanya dinikahkan, selanjutnya diasingkan. Hal ini sebagaimana hadits Nabi SAW:

عليه : عنه
(سَيِّئاً لَهُنَّ ، بِالْثَّيِّبِ وَالْثَّيِّبُ ،)

Artinya: “Dari Ubadah Ibnu al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejak berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam." (HR. Muslim)²⁸

Selanjutnya, ketika perzinahan dilakukan antara laki dan perempuan yang sudah menikah atau antara laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan yang belum menikah (gadis) sebagaimana terjadi dalam tradisi nikah naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, maka laki-laki tersebut dikenakan sanksi *rajam*, sementara perempuan tersebut dicambuk seratus kali dan diasingkan. Hal ini sebagaimana hadits Nabi SAW:

(عَنْهُمَا) الْجُهَنِيِّ وَزَيْدٍ عَنْهُ هُرَيْرَةُ
 يَا : عَلَيْهِ
 - مِنْهُ أَفْقَهُ وَهُوَ -
 هَذَا عَسِيقًا : : , , بَيْنَنَا
 ,وَوَلِيدَةٍ مِنْهُ فَافْتَدَيْتُ , بِأَمْرَاتِهِ

²⁸ Muslim Bin al-Hajj Abu al-Husin al-Qasyiriy al-Naisaburiy, *Shaheh Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, t.th), h. 993

بِيَدِهِ , وَتَغْرِيبُ , أَلْهَلْ : هَذَا ,
 عَلَيْكَ , أَلْوَلِيدَةُ , بَيْنَكُمَا لِأَقْضَيْنِ هَذَا ,
 (فَارْجُمَهَا هَذَا , أَنْيْسُ يَا , وَتَغْرِيبُ هَذَا , عَلَيْهِ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah dan Zaid Ibnu Kholid al-Juhany bahwa ada seorang Arab Badui menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, dengan nama Allah aku hanya ingin baginda memberi keputusan kepadaku dengan Kitabullah. Temannya berkata -dan ia lebih pandai daripada orang Badui itu-: Benar, berilah keputusan di antara kami dengan Kitabullah dan izinkanlah aku (untuk menceritakan masalah kami). Beliau bersabda: "Katakanlah." Ia berkata: Anakku menjadi buruh orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Ada orang yang memberitahukan kepadaku bahwa ia harus dirajam, namun aku menebusnya dengan seratus ekor domba dan seorang budak wanita. Lalu aku bertanya kepada orang-orang alim dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa puteraku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedang istri orang ini harus dirajam. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya, aku benar-benar akan memutuskan antara engkau berdua dengan Kitabullah. Budak wanita dan domba kembali kepadamu dan anakmu dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Berangkatlah, wahai Anas, menemui istri orang ini. Bila ia mengaku, rajamlah ia." (HR. Muslim).²⁹

Dari beberapa dalil di atas, sudah jelas dan dapat dipahami bahwa sanksi yang akan dikenakan bagi pelaku tradisi nikah naik antara laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan gadis di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, dimana terhadap laki-laki tersebut dilaksanakan hukum rajam, dan bagi perempuannya dikenakan hukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan.

²⁹ Ibid, h. 992

2. *Dampak Yang Ditimbulkan Dari Nikah Naik di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir*

Dampak yang ditimbulkan dari tradisi nikah naik yang terjadi antara seorang gadis dengan laki-laki yang berstatus sudah menikah di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, yaitu banyaknya anak lahir di luar nikah, merupakan aib di masyarakat, konflik antar keluarga, dan dikucilkan dari keluarga. Dari beberapa dampak di atas, maka dapat dipahami dampak yang ditimbulkan dari tradisi nikah naik yang terjadi antara seorang gadis dengan laki-laki yang berstatus sudah menikah di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir lebih bersifat negatif dan hampir tidak ada yang berdampak positif, dimana dari beberapa dampak tersebut harus dan dapat dihindari, bila masing-masing individu senantiasa selalu terikat kepada hukum syara' (hukum Islam). Hal ini sebagaimana kaidah syara' yang berbunyi:

يكون حيثما تـكون

Artinya: "Dimana diterapkan hukum syara', di sana terdapat kemaslahatan"³⁰.

Dari dalil di atas jelas bahwa dengan terikatnya kepada hukum syara', maka akan diperoleh berbagai kemaslahatan. Karena, manusia tidak mengetahui dari perbuatannya terdapat kemaslahatan (kebaikan) atau tidak. Akan tetapi, yang mengetahui bahwa dari perbuatan yang dilakukan memperoleh kemaslahatan (kebaikan) hanya Allah SWT. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

³⁰ Masjfuk Zuhdi, *Op. Cit*, h. 101.

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا
وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Artinya: “sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” (TQS. al-Baqarah [2]: 216)³¹.

Dari dalil di atas, jelas bahwa suatu kemaslahatan (kebaikan) mutlak dari Allah SWT semata. Karena hanya Allah SWT yang mengetahui secara pasti kemaslahatan dari suatu perbuatan, sementara manusia tidak mengetahui sama sekali. Selanjutnya, dari beberapa dampak yang ditimbulkan bahwa dampak dari nikah naik bertolak belakang dengan tujuan pernikahan, yaitu:

- a. Pernikahan merupakan sunnah. Dalam hal nikah naik tidak didasari atas dasar sunnah, melainkan karena tradisi dan keterpaksaan. Karena berdasarkan hasil wawancara sebagaimana diuraikan di atas, dimana pernikahan dengan cara nikah naik tidak berangkat dari keinginan kedua belah pihak untuk menikah.
- b. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah. Dalam hal pernikahan tidak menjadi ibadah, melainkan pintu menuju kemaksiatan dan melegalkan kemaksiatan tersebut. Karena, di antara faktor yang melatarbelakangi terjadinya tradisi nikah naik karena faktor perzinahan. Meskipun, ditemukan adanya faktor selain perzinahan (faktor ekonomi). Akan tetapi, faktor ekonomi umumnya terjadi ketika tradisi nikah naik antara pasangan seorang gadis dan bujang.

³¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 34.

Berdasarkan uraian dari analisis hukum Islam tentang tradisi nikah naik yang terjadi antara seorang gadis dengan laki-laki yang berstatus sudah menikah di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, bertentangan dengan hukum Islam. Karena disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadi nikah naik tersebut. Akan tetapi, ketika tradisi ini dilakukan semata-mata sebagai solusi agar memudahkan dalam melangsungkan perkawinan, dan tidak diawali dengan perzinahan, maka tradisi nikah naik dibolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Keadaan demikian tidak berlaku bagi pelaku tradisi nikah naik antara seorang laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan (gadis). Karena dari pernikahannya menimbulkan berbagai dampak baik isteri maupun anak. Selanjutnya, dalam pernikahan tersebut terjadi tidak secara damai antara laki-laki dengan isteri pertama. Dengan demikian, jelas bahwa tradisi nikah naik yang terjadi antara seorang gadis dengan laki-laki yang berstatus sudah menikah di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir bertentangan dengan hukum Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan, dan selanjutnya dianalisis berdasarkan hukum Islam, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan tradisi nikah naik yang terjadi antara seorang gadis dengan laki-laki yang sudah menikah di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, merupakan suatu aib di masyarakat. Pernikahan tersebut dilatarbelakangi oleh faktor perzinahan, faktor ekonomi. Hanya saja, khusus faktor ekonomi, bisanya faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah naik antara bujang dan gadis, bukan antara gadis dan laki-laki yang sudah menikah. Sebagian besar masyarakat di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir mengetahui adanya tradisi nikah naik. Namun, ada yang mendukung, menolak dan bersifat netral. Akan tetapi, bagi para isteri sangat menolak dengan adanya nikah naik yang dilakukan orang suaminya.

Ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari tradisi nikah naik yang terjadi antara seorang gadis dengan laki-laki yang sudah menikah di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, yaitu kenakalan remaja, pergaulan bebas, adanya anak yang lahir di luar nikah, konflik antarkeluarga, dan dikucilkan dari keluarga.

Berdasarkan uraian dari analisis hukum Islam tentang tradisi nikah naik yang terjadi antara seorang gadis dengan laki-laki yang berstatus sudah menikah di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, bertentangan dengan hukum Islam. Karena disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadi nikah naik di antara perzinahan. Akan tetapi, ketika tradisi ini dilakukan

semata-mata sebagai solusi agar dimudahkan dalam melangsungkan perkawinan, dan tidak diawali dengan perzinahan, maka tradisi nikah naik dibolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Keadaan demikian tidak berlaku bagi pelaku tradisi nikah naik antara seorang laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan (gadis). Karena dari pernikahannya menimbulkan berbagai dampak baik isteri maupun anak. Selanjutnya, dalam pernikahan tersebut terjadi tidak secara damai antara laki-laki dengan isteri pertama.

Dengan demikian, jelas bahwa tradisi nikah naik yang terjadi antara seorang gadis dengan laki-laki yang berstatus sudah menikah di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran–Saran

Dari penelitian ini terdapat beberapa saran penelitian, yaitu:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa nikah naik merupakan suatu tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu hukum yang berkaitan dengan pernikahan.
2. Memberikan masukan dan motivasi kepada masyarakat untuk selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang hukum Islam secara utuh, sehingga beberapa dampak yang bersifat kemudharatan yang dilakukan.
3. Menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah, agar bersikap dan membuat berbagai kebijakan serta sanksi kepada para pelaku perzinahan dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- _____, *Kompilasi Islam Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo. 1992.
- Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus: Indonesia – Arab; Arab-Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1971.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fikih Praktis*, Jakarta: Mizan, 2002.
- Al-Jazairi, Abu Bakr. *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2002, Cet. Ke-4.
- Anwar, Dessy. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Indah, 2001, Cet. Ke-1.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005, Cetakan Kelima.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ictiar Van Hoeve, 1997.
- Depdikbud, *Kamus Umum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Pernada Media, 2004.
- Ghazali, Abd. Rahmat. *Fqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, Cetakan Kedua.
- Muslim Bin al-Hajj Abu al-Husain al-Qosyiri al-Naisaburi, *Shaheh Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turatsu al-Arabi, t.th
- Nur, Djaman, *Fikih Munakahat*, Semarang: Bina Utama, 1993.
- RI, Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Mahyuddin Syaf, Bandung: Al-Ma'rif, 1976, Cetakan Pertama.
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Damasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, diterjemahkan oleh 'Abdullah Zaki al-Kaf, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004, Cetakan Kedua.
- Syawaqi, dkk, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, Surabaya: Indah, 1996.

Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974, Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1990.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.